



KEBIJAKAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM: REFLEKSI ATAS KEPEMIMPINAN RKY RAHMAH EL YUNISIYAH

Syafwan Rozi

Dosen Filsafat Agama FUAD LAIN Bukittinggi
E-mail: sya_ra_de@yahoo.co.id

Devi Wahyuni

Pendidikan Agama Islam FTIK LAIN Bukittinggi
e-mail: devi10@yahoo.com

DOI: http://dx.doi.org/10.30983/islam_realitas.v3i1.273

Diterima: 14 Juni 2017

Direvisi : 07 Juli 2017

Diterbitkan: 15 Juli 2017

Abstract

Female leadership, normatively, has very strong legitimacy, both theologically, philosophically, and legally. One of them is Presidential Instruction No. 9 of 2000 on gender mainstreaming in National Development which requires all National Development Program policies and programs to be designed with a gender perspective. Education that has a basic concept as a process of transfer of value and transfer of knowledge can not be separated from the role and participation of women with the condescendent characteristics, educators, compassionate which is the key to the world of education. However, when it comes to the issue of women's public role, it is still a hot and central issue both locally and nationally. The issue is still very seriously debated by society scientifically. Is it proper and capable if women appear to lead the public in social sectors including education? If we do reflections from the past of women's leadership journey, the answer will be found. Rky Rahmah el Yunusiyah's work was very subtle in 1923 when she established a special religious school for girl, namely Diniyyah Puteri. The girls' Special School is the main female pillar in Minangkabau to establish its influence in the ranks of religious leadership in the effort to combine religious education and modern education. How did a Rahmah struggles with traditions/ customs and religions to assure her debut and her work in leading an institution? In the contemporary context that needs to be prepared by women is the empowerment of independent and intelligent attitudes, so that the potential possessed can develop optimally.

Keywords: Female Leadership, Islamic Education, Rahmah el Yunusiyah

Abstrak

Kepemimpinan perempuan secara normatif memiliki legitimasi yang sangat kuat, baik secara teologis, filosofis maupun hukum. Salah satunya adalah Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional yang mengharuskan seluruh kebijakan dan Program Pembangunan Nasional dirancang dengan perspektif gender. Pendidikan yang mempunyai konsep dasar sebagai proses alih nilai (*transfer of value*) dan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) tidak bisa dilepaskan dari peran dan keikutsertaan kaum hawa dengan sifat pengayom, pendidik, pengasih yang merupakan kunci utama dunia pendidikan. Hanya saja, ketika menyinggung persoalan peran publik perempuan masih merupakan isu hangat dan sentral baik secara lokal maupun secara nasional. Persoalan tersebut masih sangat serius diperdebatkan oleh masyarakat. Apakah pantas dan mampu perempuan tampil memimpin publik di sektor sosial kemasyarakatan termasuk pendidikan. Kalau kita lakukan refleksi dari perjalanan kepemimpinan perempuan masa lalu akan ditemukan jawabannya. Seperti kiprah Rky Rahmah el Yunusiyah sangat kentara pada tahun 1923 pada saat mendirikan Sekolah agama khusus untuk perempuan Diniyyah Puteri. Sekolah Khusus putri ini adalah pilar utama perempuan di Minangkabau untuk menegakkan pengaruhnya dalam jajaran kepemimpinan agama dalam upaya menggabungkan pendidikan agama dan pendidikan modern. Bagaimana seorang Rahmah bergulat dengan tradisi/adat dan agama untuk meyakinkan debut dan kiprahnya dalam memimpin sebuah lembaga. Dalam

konteks kekinian yang perlu dipersiapkan kaum perempuan adalah pemberdayaan sikap mandiri dan cerdas, sehingga potensi yang dimiliki bisa berkembang seoptimal mungkin.

Kata Kunci: Kepemimpinan Perempuan, Pendidikan Islam, Rahmah el Yunisyyah

Latar Belakang

Isu mengenai peran publik perempuan masih merupakan isu hangat dan sentral baik secara lokal maupun secara nasional pada dekade terakhir ini. Persoalan tersebut masih sangat serius diperdebatkan oleh masyarakat. Padahal dalam berbagai kondisi perempuan dituntut untuk maju sebagai pemimpin. Selain menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, perempuan juga dimungkinkan untuk bisa menjadi pemimpin di komunitasnya. Hal ini terjadi karena desakan kebutuhan. Namun, sedikit disayangkan, dalam kenyataannya tidak banyak perempuan yang kemudian mau dan bisa muncul menjadi pemimpin.

Bukan hanya itu, bahkan dalam bidang pendidikan sekalipun masih terjadi bias gender. Berdasarkan penelitian Ace Suryadi, ditemukan masih rendahnya tingkat pendidikan perempuan dibanding laki-laki. Hal yang sangat mencolok di tingkat sarjana perempuan berpendidikan S1 mencapai 2,1% yang masih lebih rendah dari penduduk laki-laki yang berpendidikan S1 nya 3,2%.¹ Karena dalam kenyataan empirik membuktikan bahwa semakin tinggi pendidikan seorang maka tingkat pendapatan juga akan itu berpengaruh. Kondisi ini dirasakan oleh perempuan

¹Berdasarkan angka statistik kesejahteraan rakyat dari Biro Pusat Statistik pada tahun 2007/2008 penduduk perempuan yang berpendidikan SD sudah mencapai 33,4% yang bahkan sedikit lebih tinggi daripada laki-laki lulusan SD 32,5%. Perempuan yang berpendidikan SLTP 13% sedikit lebih rendah dari laki-laki yang berpendidikan sama yaitu sebesar 15%. Penduduk perempuan yang berpendidikan SMA adalah 11,4% atau lebih rendah dari laki-laki yang berpendidikan sama yaitu sebesar 15,7%. Ace Suryadi dan Ecep Idris, *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan* cet. I (Bandung: Genesindo, 2004), h.19

memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah di dibandingkan dengan laki-laki. Kesenjangan gender juga dapat dilihat dari angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. Angka partisipasi murni (APM) untuk sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) lebih rendah dan untuk perempuan masih lebih rendah lagi, yaitu 34,06% laki-laki dan 31,14% untuk perempuan²

Rendahnya partisipasi perempuan menurut Windyastuti, disebabkan oleh kurangnya upaya mempersiapkan perempuan sebagai mitra kerja sejak dini. Budaya patriarki yang terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, membuat kedudukan perempuan menjadi terpinggirkan.³ Akibatnya, kualitas dari perempuan pun menjadi rendah. Diakui atau tidak, akibat dari kualitas rendah inilah keberadaan perempuan pada posisi-posisi puncak dari sebuah komunitas, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, selalu ada pada angka kecil, atau bahkan bisa jadi tidak ada sama sekali.

Padahal, partisipasi dan kepemimpinan perempuan secara normatif memiliki legitimasi yang sangat kuat, baik secara teologis, filosofis

²Berdasarkan angka statistik pendidikan tahun 2008, angka partisipasi murni (APM) sekolah dasar (SD) sebesar 96,64% untuk laki-laki, dan sedikit lebih kecil untuk perempuan yaitu sebesar 94,34%. Sedangkan untuk APM tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) sudah mengalami kesetaraan gender, meskipun dalam angka yang masih sama-sama menunjukkan hasil rendah yaitu 56,62% laki dan 56,30% perempuan. Laporan Biro Pusat Statistik, *Indikator Wanita dan Anak*, (Jakarta: PT Rineka Karya, 2001), h. 21. Lihat juga Ace Suryadi dan Ecep Idris, *Kesetaraan Gender.....*, h. 20.

³Dwi Windyastuti, "Pengaruh Sosialisasi Gender pada Perempuan Kelas Menengah terhadap Kesadaran Politik," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. XIV, No. 2, 2001, h. 31.



maupun hukum.⁴ Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah disetujui oleh negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia, terdapat sejumlah pasal yang memberikan kebebasan kepada perempuan untuk memilih pemimpin maupun menjadi pemimpin.⁵ Begitu juga dalam konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 (UU No 39/1999). Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, telah memberikan jaminan bahwa perempuan terbebas dari tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun. UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah menjamin keterwakilan perempuan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif (pasal 46). Selain itu, Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional yang mengharuskan seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional dirancang dengan perspektif gender.

Pendidikan sebagai lembaga yang berperan menanamkan nilai-nilai dan pengetahuan kepada anak didiknya. Keberadaan pendidikan secara makro diharapkan dapat berperan aktif dan memberi kontribusi yang berbobot dalam *social engenering* (rekayasa sosial) dan transformasi sosio-kultural. Ranah pendidikan ini yang sangat dekat dengan dunia kaum hawa dengan

sentuhan pendidik, pengayom dan kasih sayang. Pengembangan kepemimpinan perempuan dalam ranah ini sangat efektif. Hanya saja persoalannya adalah kesiapan perempuan itu sendiri dalam menerima amanah tersebut. Menyimak sejarah kepemimpinan Rky Rahmah el Yunusiyah, pemimpin Pendidikan Diniyah Puteri Padang Panjang merupakan sebuah refleksi bagaimana menatap jalan berliku fenomena kepemimpinan perempuan yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Dengan menggunakan metode kepustakaan, tulisan ini akan mengungkap bagaimana seorang Rahmah bergulat melawan tradisi dan pandangan agama yang sempit pada waktu itu yang membatasi peran perempuan dalam pengabdian dan perjuangan sosial sehingga mampu memajukan perguruan agama khusus perempuan ini. Makalah ini akan mencoba mengulas kebijakan kepemimpinan perempuan dalam pendidikan Islam dari refleksi perjuangan Rahmah el Yunusiyah dalam Perguruan Diniyah Puteri-nya.

Kepemimpinan Rky Rahmah el Yunusiyah dalam Pendidikan Islam

Rky Rahmah el Yunusiyah adalah salah seorang tokoh penting yang telah memajukan pendidikan perempuan pada awal abad modern di Indonesia. Ia dilahirkan di Padang Panjang pada tanggal 29 Desember 1900 dan meninggal dunia Padang Panjang pada tanggal 26 Februari 1969.⁶ Rahmah adalah anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Syekh Muhammad Yunus dan Rafi'ah. Ayahnya adalah seorang qadi di Pandai Sikat yang juga ahli dalam ilmu falak. Kakeknya adalah Syekh Imaduddin, ulama terkenal Minangkabau dan tokoh Tarekat Naksyabandiah.⁷ Menurut catatan Cora Vreede, pada awalnya Rahmah tidak

⁴Astuti, Tri Marhaeni Pudji, "Citra Perempuan dalam Politik", *Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang*, Vol. 2, No. 1, 2008, h. 3-16.

⁵Terkait dengan tantangan dan peluang advokasi hak asasi manusia dalam isu gender, baca Stephanie Farris, "Human Rights Advocacy on Gender Issues: Challenges and Opportunities", *Journal of Human Rights Practice*, Vol. 1, No. 1, 2009, h. 83-100; A. Byrnes and E. Bath, "Violence against Women, the Obligation of Due Diligence, and the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – Recent Developments", *Human Rights Law Review*, Vol. 8, No. 3, 2008, h. 517-533.

⁶ Abdul Aziz Dahlan [ed.], *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeven, 1997), h. 342.

⁷ Aminuddin Rasyad, "Rahmah el-Yunusiyah: Kartini Perguruan Islam", *Prisma*, Vol 24 Tahun 1997, h. 102.

melanjutkan pendidikan karena diharuskan menikah pada usia 15 tahun. Setelah beberapa tahun perceraian, Rahmah dianugerahi kekuatan dan semangat yang luar biasa untuk mewujudkan cita-cita yaitu meningkatkan martabat perempuan.⁸ Akhirnya ia mengikuti jejak pendidikan kakaknya Zainuddin Labai el-Yunusiyah pendiri perguruan agama Islam Diniyyah Puteri tahun 1915 di Padang Panjang Sumatera Barat⁹. Rahmah berguru pada Haji Rasul, dan sejumlah tokoh agama terkemuka lainnya di Minangkabau di antaranya seperti Haji Abdul Karim Amrullah, Abdul Hamid Hakim, Syekh Muhammad Djamil Djambek, Syekh Abdul Latif Rasjidi, dan Syekh Daud Rasjidi.¹⁰ Selain ilmu keislaman, ia juga mempelajari ilmu kesehatan (khususnya kebidanan) dengan sejumlah dokter pribumi lulusan sekolah Belanda dan keterampilan wanita seperti memasak, menenun dan menjahit. Dengan demikian Rahmah muda berkeinginan supaya kelak ilmu yang diperolehnya ini diajarkannya kepada murid-muridnya di Diniyah Puteri, melalui pendirian sekolah itu Rahmah berkeinginan agar wanita Indonesia memperoleh kesempatan penuh untuk menuntut ilmu yang sesuai dengan kodrat wanita hingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Kiprah Rahmah sangat kentara pada tahun 1923 pada saat mendirikan Sekolah agama khusus untuk perempuan. Diniyyah Puteri adalah pilar utama perempuan di Minangkabau untuk menegakkan pengaruhnya dalam jajaran kepemimpinan agama dalam upaya menggabungkan pendidikan agama dan

pendidikan modern. Dari dulu sampai sekarang Diniyyah Puteri terus diminati tidak hanya oleh srikandi-srikandi Minangkabau tapi juga dari daerah lain di Nusantara, bahkan sampai ke negara jiran Malaysia dan Brunei Darussalam.

Sistem pendidikan Diniyyah bermula dengan dibentuknya Madrasah Ii Banat (sekolah untuk putri) pada tanggal 1 November 1923. Selama dua tahun pertama cara belajarnya menggunakan sistem *balaqah* seperti yang diterapkan di Masjidil Haram, yakni para murid duduk di lantai mengelilingi guru yang menghadap meja kecil.¹² Hal ini bersamaan dengan model pendidikan surau pada waktu itu sebagai lembaga pendidikan di Minangkabau yang juga melibatkan murid-murid perempuan. Walaupun tatanan nilai dalam masyarakat Minangkabau tidak menyebutkan larangan perempuan untuk menjadi guru di surau. Namun dalam kenyataannya, hampir keseluruhan pendapat menunjukkan penguatan kepada adanya hak istimewa laki-laki untuk menjadi guru dan ulama. Hal ini berujung kepada dominasi laki-laki dalam menafsirkan dan mengajarkan hukum-hukum Islam di Minangkabau. Di antaranya pendapat mengatakan "Tidak pernah dalam sejarah perempuan menjadi guru, membawa-bawa buku, dan mengabaikan tugas-tugasnya di rumah. Apakah buku-buku itu bisa menolong mereka dalam bekerja di dapur?"¹³

Latar belakang inilah yang mendorong Rahmah el Yunusiyah untuk mendirikan surau khusus untuk perempuan, sebuah perguruan yang melahirkan perempuan-perempuan yang mahir dalam bidang pengajaran agama Islam. Dalam perspektif Rahmah, pendirian Diniyyah Puteri adalah proses yang sangat penting guna menguji kemampuan dan pengaruhnya dalam

⁸ Cora Vreede De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia, Gerakan dan Pencapaian* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), h. 102-103.

⁹ Tim, *Boekoe Peringatan 15 Tahun Dinijah Schoool Poetri Padang Pandjang* (Padang Pandjang: Dinijah School Padang Pandjang, [t.th.]), h. 44.

¹⁰ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia (1900-1942)* (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 42.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan [ed.], *Ensiklopedi Islam*, h. 345.

¹² Tim, *Boekoe Peringatan 15 Tahun Dinijah Schoool Poetri Padang Pandjang*, h. 25.

¹³ Rani Amelia, *Studi Konflik dan Perdamaian (Memperbaiki Dunia Melalui Tangan-tangan Perempuan)* (Padang: Andalas Press, 2008), h. 77.

memimpin reformasi agama ditempatnya. Dengan mendirikan lembaga khusus untuk perempuan, ia bebas mendayagunakan segenap pikiran dan penalarannya untuk memperkuat pemahaman orang-orang tentang nilai agama, kiprah dan peran perempuan.

Rahmah menyadari bahwa untuk sampai kepada tujuan itu perempuan harus membangun jaringan dan akses di luar dunia perempuan. Strategi dan kepemimpinan Rahmah memang mengejutkan masyarakat. Seperti dikemukakan Aminuddin Rasyad, bahkan pada awalnya ayahnya tidak menyetujui rencana pendirian perguruan khusus untuk perempuan¹⁴. Pendirian perguruan khusus untuk perempuan mengundang perhatian publik karena merupakan hal yang baru dan fatamorgana pada masa itu. Ketika Diniyyah Puteri baru didirikan rata-rata orang Minangkabau menganggapnya sebagai usaha yang sia-sia. Kondisi sosial masyarakat pada waktu itu hanya memberi keuntungan kepada laki-laki, sementara kaum perempuan terpinggir dan tertinggal di belakang. Protes ini wajar sebab kiprah perempuan di sektor publik hanya menghabiskan waktu di luar rumah, bahkan untuk belajar sekalipun, adalah suatu hal yang "tabu" bagi perempuan. Jika itu dimaksudkan hanya untuk menyamakan hak, tanpa mengeluarkan sebuah manfaat untuk keluarga, masyarakat dan bangsanya, maka reaksi yang demikian ini akan meluas dengan sendirinya.

Dalam kondisi mosi ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam seperti inilah para murid-murid Rahmah el-Yunusiyah muncul menghentikan polemik, meluruskan pendapat, menyadarkan orang-orang dan menunjukkan apa tujuan yang hendak diwujudkan melalui usaha perempuan tersebut. Salah seorang murid Diniyyah Puteri

seperti dikutip di 15 tahun Diniyyah menjawab tantangan itu dengan mengatakan:

"Saya mengetahui saya hidup di jaman modern yang terus menerus berubah. Karena itulah saya tidak membiarkan diri saya hidup dalam kegelapan. Tentang kewajiban untuk meraih kemajuan, tidak ada perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Allah telah berfirman: Aku tidak akan membiarkan usaha kalian sia-sia. Pergi dan berusaha kalian laki-laki dan perempuan. Melalui ayat ini marilah kita menengok kembali ke zaman lampau, masa di bawah kepemimpinan Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, kaum perempuannya bergiat dan aktif, seperti yang ditunjukkan Khadijah dan Aisyah (istri-istri Muhammad) dan Fatimah (anak perempuannya) dan yang lain-lainnya. Mereka ikut di dalam membicarakan masa depan setelah nabi wafat, marilah kita mencontoh mereka¹⁵.

Tidak ada keraguan dalam bentuk apapun bahwa pemisahan diri perempuan dari surau-surau yang dipimpin oleh laki-laki bisa menjadi koreksi dan jembatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, dengan tidak memisahkan diri dari soal kebangsaan dan dilakukan dengan cara yang memungkinkan orang-orang yang melakukan introspeksi diri, bersifat membangun kualitas hidup. Sekalipun terpisah, Diniyyah Puteri tetap menjaga hubungan baik dan kerjasama dengan surau-surau yang lain dan para pemimpinnya serta orang-orang yang menggerakkan reformasi, baik dari kalangan surau maupun luar surau. Sebagai suatu lembaga baru usaha ini jelas membutuhkan dukungan banyak orang, kekuatan tambahan, dan dengan melibatkan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Pada kasus tertentu di

¹⁴ Aminuddin Rasyad, "Rahmah el-Yunusiyah: Kartini Perguruan Islam." h. 105.

¹⁵Tim, *Boekoe Peringatan 15 Taboen Dinijjah Poetri Padang Panjang*...., h. 23.

Diniyyah Puteri, Rahmah melakukan lobi untuk mendapatkan dukungan dari Zainuddin Labai dan anggota-anggota perkumpulan Diniyyah telah bertindak sebagai pelindung Diniyyah Puteri. Namun belum lagi tegak berdiri kokoh perguruan ini, Zainuddin Labai meninggal dunia. Kepergian pelindung sekaligus orang yang sangat berpengaruh dalam reformasi pendidikan Islam di Minangkabau ini mendatangkan implikasi besar kepada Diniyyah Puteri. Diantaranya adalah konsistensi dukungan dari anggota-anggota Perkumpulan Diniyyah.

Masalah demi masalah timbul, di antaranya desakan agar Diniyyah Puteri bergabung ke dalam partai politik. Usaha ini terutama dimajukan oleh Permi (Partai Muslim Indonesia). Dalam menghadapi tekanan partai, Rahmah menyadari bahwa ia harus hati-hati. Partai inilah yang terkuat dan banyak menghimpun pemimpin lokal dan pemimpin perempuan di dalamnya. Semangat untuk berhimpun ke dalam partai tidak hanya di kalangan orang-orang yang aktif dalam politik. Semangat itu juga sedang tumbuh subur pada para guru dan murid-murid perguruan Islam. Lagi pula semangat itu bukan didasarkan untuk mencari kedudukan dalam pemerintahan, melainkan dilandaskan pada kehendak untuk mewujudkan kemerdekaan bagi bangsanya. Ini membuat Rahmah terjepit dalam dua pilihan yang sangat sulit.

Ketika diadakan permusyawaratan besar dari guru-guru agama Islam se-Minangkabau di tahun 1931, maka Rahmah tidak dapat tidak harus hadir dalam rapat tersebut. Namun Ia tidak mengeluarkan pendapat satu kalipun dalam rapat itu. Juga tidak mengirim satu orangpun utusan Diniyyah Puteri untuk duduk dalam Dewan Pengajaran Permi. Tindakan ini tidak disukai dalam pergerakan nasionalisme, sebab semakin banyak elemen yang berhimpun dalam pergerakan itu semakin besar peluang untuk menang, dan semakin tinggi keabsahan

gerakan itu untuk memerintah bangsanya kelak. Muchtar Lufti, pimpinan Permi langsung datang ke perguruan Rahmah untuk meminta anggota perguruan itu bergabung. Di belakang pimpinan partai ini ada sejumlah tokoh-tokoh Minangkabau terkemuka, laki-laki dan perempuan yang ikut mendesak.

Selama proses itu Rahmah membiarkan murid-muridnya tampil kedepan, berdebat dan mengajukan pendapat sendiri tentang hal yang sedang dipermasalahkan. Tindakan ini memberi pesan kepada partai bahwa Rahmah bukanlah pemilik otoritas dalam membuat keputusan atas perguruan yang dipimpinnya, sekalipun ia yang mendirikan. Jawaban para murid Rahmah dituliskan kembali dalam buku Peringatan Lima Belas Tahun Dinijjah Poetri sebagai berikut:

"Dan kami meminta: biarlah perguruan itu terasing selama-lamanya dari partai politik, dan tinggalkanlah ia menjadi urusan dan tanggungan orang banyak (umum), sekalipun umum itu dalam aliran politiknya bermacam-macam warna dan ragam, tapi untuk perguruan dan penanggung jawab atasnya haruslah mereka satu adanya"

¹⁶

Dapat dilihat bagaimana bentuk kata-kata dan ekspresi para murid Diniyyah Puteri waktu menghadapi persoalan dan tekanan dari luar. Mereka tidak meminta pihak yang menekannya mengubah sikap dan pendirian. Mereka hanya mengajukan pandangan alternatif tentang konsekuensi-konsekuensi yang harus dipikul baik oleh pihak yang menekan dan yang ditekan. Dengan menunjukkan suatu perhitungan yang nyata, tidak hanya berdasarkan perasaan tapi juga pertimbangan rasional tentang berbagai persoalan yang akan dihadapi bersama, maka pihak yang menekan tidak bisa menyangkal bahwa setiap orang memiliki hak untuk

¹⁶Tim, *Boekoe Peringatan 15 Taboen Dinijjah Poetri Padang Pandjang...* h. 79.

memutuskan yang baik bagi masyarakatnya, namun jalan yang terbaik adalah dengan mempertimbangkan kebaikan bagi semuanya.

Refleksi Kepemimpinan Rky Rahmah el Yunusiyah: Kebijakan Kepemimpinan Perempuan dalam Pendidikan Islam.

Pendidikan, apapun bentuknya, tidak boleh kehilangan hakikatnya, termasuk di dalamnya pendidikan keagamaan dan keilmuan, karena realitas dalam kehidupan pada hakekatnya bersifat multidimensional¹⁷. Pendidikan agama yang dimaksud salah satunya adalah “perguruan agama” yang di dalamnya tercipta heterogenitas. Kehadiran pemimpin yang fleksibel dibutuhkan. Peran pemimpin dalam ranah pendidikan juga amat penting dan signifikan. Seorang pemimpin atau kepala sekolah harus mengatur dan mengorganisir isi, proses, situasi, dan kegiatan sekolah secara multikultur, dimana tiap siswa dari berbagai suku, ras, jender, berkesempatan untuk mengembangkan dirinya dan saling menghargai perbedaan itu. Pemimpin perlu menekankan diversity dalam pembelajaran antara lain; 1) Mendiskusikan sumbangan aneka budaya dan orang dari suku lain dalam hidup bersama sebagai bangsa, dan 2) mendiskusikan bahwa semua orang dari budaya apapun ternyata juga menggunakan hasil kerja orang lain dari budaya lain. Dalam pengelompokan siswa di kelas maupun dalam kegiatan di luar kelas guru diharapkan memang melakukan keanekaan itu¹⁸.

Kalau ditarik benang merah dari perjalanan membangun kualitas hidup. Dengan hubungan yang setara antara guru dan murid, dan kesempatan yang berimbang dalam memutuskan antara pemimpin dan orang-orang yang dipimpin. Maka Diniyyah Puteri

menjadi sebuah proses yang menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian perempuan dalam menjalankan kepemimpinan di masa depan. Sebagai pendiri, penyumbang dana, pemikir, pemimpin sekaligus pemilik lahan bagi pendirian sekolah ini, Rahmah bisa saja mendominasi keputusan dalam lembaga itu, atau mendapatkan hak-hak istimewa atau ditempatkan lebih tinggi dalam jajaran kepemimpinan Diniyyah Puteri. Tapi Rahmah tidak membiarkan itu terjadi di sekolahnya.

Sejak awal Rahmah telah mengajarkan kepada murid-muridnya, melalui tindakan nyata. Hal ini sesuai dengan cita-cita pendidikannya yang sesuai dengan tujuan Perguruan Diniyyah yaitu membentuk puteri yang berjiwa Islam dan ibu pendidik yang cakap dan aktif serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air atas dasar pengabdian kepada Allah¹⁹. Di samping itu ia menekankan kepada murid-muridnya untuk tidak membesar-besarkan jasanya, mengkultuskannya, menghormati pemimpin sewajarnya, dan terus menerus mengingat jasa orang-orang banyak pada kemajuan sekolah ini. Ini ditunjukkan dengan terang melalui sikap dan tindakannya dalam menghadapi masalah. Bahkan menurut Cora, dalam kebijakannya, Rahmah menolak menerima subsidi dana dari pemerintah untuk pengembangan perguruan, demi mencegah intervensi yang dapat mempengaruhi kurikulum dan program yang disusunnnya²⁰.

Melalui penerbitan buku *Peringatan Lima Belas Tahun Dinjaj Poetri*, perguruan ini seakan ingin memberi pesan kepada orang-orang bagaimana pembaharuan Islam mestinya dijalankan, apa yang mesti dilakukan oleh para pemimpinnya dan bagaimana agar pembaharuan itu benar-benar terwujud. Jika

¹⁷ Musa Asyarie, Opini, “Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa”, *Republika* Jum’at 03 September 2004).

¹⁸ Paul Suparno, “Pendidikan Multikultural”, *Harian Kompas*, 7 Januari 2003.

¹⁹Hasiah Saleh, *Sejarah Ringkas Perguruan Diniyah Puteri* (Padang Panjang: CV Thoha Putera, t.th), h. 5.

²⁰ Cora Vreede De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia, Gerakan dan Pencapaian*, h. 102-103.

ada orang-orang yang memakai usaha itu untuk menarik keuntungan pribadi dan jika pemimpin tidak mau berkorban lebih besar dari orang-orang yang dipimpinnya pastilah usaha tersebut akan gagal. Dari semua proyek perubahan, hanya perguruan inilah yang merajut perubahan dengan nilai-nilai, yang secara sukarela bertindak sebagai infrastruktur untuk melatih diri, menyumbangkan pemikiran dan diplomasi menghadapi kekuasaan. Perguruan ini telah membantu banyak perempuan dalam mengembangkan pemahaman tentang dunianya, kekuatan yang menopang hidupnya, yang membuatnya jadi benar-benar berdaya dan berkuasa atas kehidupan, yakni tubuh moral dari diri sendiri.

Perguruan ini telah mengubah anggapan umum, dengan membawa orang-orang melihat sendiri apa yang dapat dilakukan oleh perempuan Muslim untuk kemaslahatan bangsanya. Murid-murid berdatangan dari penjuru tanah air bahkan dari luar negeri. Sampai sekarang lembaga ini masih berjaya dan tetap diakui sebagai simbol keberhasilan pendidikan Islam di abad modern. Sementara surau-surau lain yang dipimpin oleh ulama pembaharuan tidak lagi terdengar suaranya, Diniyyah Puteri masih tetap memimpin dalam pendidikan surau di Minangkabau sampai sekarang. Pencapai yang telah diraih Rahmah di Minangkabau harus dianggap sebagai langkah tegas dalam sejarah perempuan di Indonesia, walaupun sebenarnya surat Kartini telah diterbitkan dan menjadi ilham terhadap sekolah Dewi Sartika.²¹

Hanya saja, sekarang persoalan yang muncul dari pengembangan kepemimpinan perempuan dalam dunia pendidikan dewasa ini adalah budaya masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Sri Setyawati bahwa faktor penyebab susahnya mengembangkan

kepemimpinan perempuan adalah mulai dari sistem dan mekanisme dalam peraturan perundangan sampai faktor kultural baik budaya dan politik maupun sistem sosial budaya lokal suatu masyarakat terhadap perempuan.²² Budaya yang bersumber dari tradisi telah berlangsung secara turun temurun menempatkan peran perempuan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik, dan mengakibatkan akses dan partisipasi perempuan dalam dunia di luar sektor domestik, menjadi sangat rendah. Konsekuensi yang terjadi kemudian, sangat logis kalau ranah luar domestik, seperti pemerintahan dan politik hingga saat ini masih patriarkhis, laki-laki mendominasi secara luas arena politik, termasuk di dalamnya memformulasikan aturan dan standar permainan politik yang menihilkan kepentingan perempuan, yang harus puas menjadi kelompok minoritas.²³ Begitu juga budaya masyarakat yang bersumber dari pemahaman agama, khususnya di tingkat lokal turut menjadi faktor yang menghambat lajunya kepemimpinan perempuan

Islam, selaku agama mayoritas yang dianut masyarakat menghendaki agar kaum perempuan dapat mengetahui hak dan kewajibannya, memahami tuntunan Islam dengan sempurna, cara-cara mendidik yang baik, melaksanakan mu'amalah dengan ketentuan yang telah diatur sedemikian rupa, bersikap dan bekerja sesuai dengan kodrat kewanitaannya sehingga dapat mengantar mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, tidak ada larangan untuk perempuan,

²²Sri Setyawati, *Dari Pedalaman Minangkabau ke Pelosok Mentawai, Perempuan, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat* (Padang: Andalas University Press, 2003), h. 170.

²³Kira Sanbonmatsu, "Gender-Related Political Knowledge and the Descriptive Representation of Women" *Political Behavior*, Vol. 25, No. 4, 2003, h. 212. Lihat juga, Nancy Isenberg, "The Personal is Political: Gender, Feminism, and the Politics of Discourse Theory", *American Quarterly*, Vol. 44, No. 3, 1992, h. 75

²¹Lihat Essai Jeanne Cuisinier "Les Madrasa Feminines de Minangkabau", *Rev et. Islam* 1955, h. 107-119.



melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya mu'amalah dalam wujud profesi apapun, selama perempuan tersebut bisa mencerminkan kepribadian Islam dan benar-benar menyadari akan ajaran Islam, sehingga orang akan menghormatinya dalam berkarir, karena dia memiliki etika yang baik sebagai aplikasi dari akhlakul karimah.

Selain itu, hal yang selama ini selalu menjadi kendala mengapa kaum perempuan selalu berada di belakang dalam soal kepemimpinan adalah: Pertama, adalah masih minimnya kualitas kemampuan managerial. Perempuan juga diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana laki-laki, dan perempuan pun memiliki konsekuensi mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan yang dipimpinnya di hadapan Allah swt. Jadi, kemampuan manajerial dalam diri seorang perempuan, mutlak harus dimiliki, sekalipun dirinya hanya menjadi seorang ibu rumah tangga. Kedua, adalah kecerdasan. Ada tiga tingkat kecerdasan yang harus dimiliki oleh seorang perempuan, sehingga bisa membentuk jiwa kepemimpinan yang baik, yaitu: 1) Kecerdasan spiritual dan kepribadian: Sifat-sifat mulia dalam diri harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah realita, bukan hanya sebagai cita-cita idealis saja, 2) Kecerdasan otak: Ini diperlukan agar bisa melahirkan ide-ide cemerlang bagi peningkatan mutu terkait dengan hal-hal di sekelilingnya, 3) Kecerdasan emosional: kecerdasan emosional akan tercermin dalam keikhlasan dan kejujuran nurani.

Dengan memiliki beberapa kemampuan tersebut, perempuan bisa melakukan berbagai peran di ranah publik dengan konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran sosial dan politik tersebut. Dengan kata lain bahwa kedudukan perempuan dalam proses sistem negara bangsa telah terbuka lebar, terutama perannya dalam masyarakat majemuk

ini, dengan tetap mengingat bahwa kualitas, kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas bagaimanapun, harus menjadi ukuran, sekaligus tanpa melupakan fungsi kodrati perempuan sebagai sebuah keniscayaan.

Kesimpulan

Kebijakan pengembangan kepemimpinan perempuan yang marak didengungkan selama ini diilhami dari ajaran teologis Islam, institusi negara dengan perangkat perundangannya serta pengalaman masa lalu dari refleksi sejarah pergerakan perempuan, Rky Rahmah el Yunisyah. Ia adalah perempuan pertama yang mendapat sebutan sebagai syaikhah (sebutan ahli agama bagi perempuan) di Indonesia, yang posisinya sederajat dengan syekh (sebutan ahli agama bagi laki-laki). Hamka mengatakan bahwa Rahmah el-Yunusiyah merupakan pelopor gerakan emansipasi wanita dalam bidang pendidikan agama.²⁴ Bahkan Zainal Abidin Ahmad menjuluki Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang yang didirikan oleh Rahmah el-Yunusiyah sebagai lambang pengetahuan wanita Islam, yang para alumnya tersebar di seluruh Indonesia dan Malaysia serta banyak pula di antara mereka yang telah melanjutkan studinya ke Timur Tengah, seperti Mesir, Kuwait, Madinah, dan lain-lain.²⁵

Berkaca dari kiprah perjuangan kepemimpinan Rahmah el-Yunusiyah, potensi kepemimpinan perempuan ke depan haruslah tertumpu pada pemberdayaan intelektual untuk menampilkan kualitas sesuai dengan yang diinginkan, sehingga jika sumber daya perempuan dimanfaatkan, maka ini akan menjadi potensi kekuatan masyarakat yang luar biasa, yang akan menjadi kenyataan. Memasuki

²⁴Hamka, *Ayahku* (Jakarta: Umminda, 1982), h. 315.

²⁵Zainal Abidin Ahmad, *Memperkenalkan dan Mempertahankan Pendidikan Agama Islam di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 285.

abad ke 21 ini, sebagian orang mulai berani mengatakan, bahwa abad ini adalah abad kebangkitan perempuan. Kondisi yang harus dipersiapkan adalah pemberdayaan sikap mandiri dan cerdas, sehingga potensi yang dimiliki bisa berkembang seoptimal mungkin. Dengan tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan, pemberdayaan memang mutlak dibutuhkan, supaya memiliki kualitas bermasyarakat dan berkeluarga yang optimal.²⁶ Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan kaum perempuan, di antaranya: pertama, melalui jalur pendidikan, baik formal maupun informal. Kedua, terciptanya kemitraan yang baik antara laki-laki dan perempuan, baik di ranah publik maupun domestik, dengan memiliki persepsi yang sama tentang dimensi perbedaan dan persamaan. Ketiga, berupaya memberdayakan diri dengan cara meningkatkan rasa percaya diri, memahami tujuan hidup dan dapat membuka diri untuk bermusyawarah. Pesatnya arus informasi saat ini, mengharuskan perempuan memanfaatkan potensi dirinya melalui pengembangan karir di luar rumah, termasuk amal mu'amalah dengan tidak melanggar ketentuan yang telah digariskan.

Daftar Pustaka

Buku Teks

- Ahmad, Zainal Abidin, *Memperkembangkan dan Mempertahankan Pendidikan Agama Islam di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Amelia, Rani, *Studi Konflik dan Perdamaian: Memperbaiki Dunia Melalui Tangan-tangan Perempuan* (Padang: Andalas University Press, 2003).
- Tim Penyusun, *Boekoe Peringatan 15 Tahun Dinijah Schoool Poetri Padang Pandjang* (Padang Pandjang: Dinijjah School Padang Pandjang, [t.th.]).

²⁶Novera Martilova, "Analisis Kualitas Sumber Daya Perempuan di Indonesia", *Humanisma: Journal of Gender Studies*, Vol. 1, No. 2 (2017): 63-72.

- Dahlan, Abdul Aziz [ed.], *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997).
- De Stuers, Cora Vreede, *Sejarah Perempuan Indonesia, Gerakan dan Pencapaian* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008).
- Hamka, *Ayahku* (Jakarta: Umminda, 1982).
- Tim, *Laporan Biro Pusat Statistik, Indikator Wanita dan Anak*, Jakarta, 2001.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia (1900-1942)* (Jakarta: LP3ES, 1996).
- Tim, *Peringatan 55 Tahun Diniyah Putri Padang Panjang* (Padang Pandjang: Dinijjah School Padang Pandjang, t.th.).
- Salah, Hasiah, *Sejarah Ringkas Perguruan Diniyah Puteri* (Padang Panjang: CV Thoha Putera, t.th.).
- Setyawati, Sri, *Dari Pedalaman Minangkabau ke Pelosok Mentawai, Perempuan, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat* (Padang: Andalas University Press, 2003).
- Suryadi, Ace dan Ecep Idris, *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan* (Bandung: Genesindo, 2004).

Jurnal

- Astuti, Tri Marhaeni Pudji, "Citra Perempuan dalam Politik", *Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2008.
- Cuisinier, Jeanne, "Les Madrasa Feminines de Minangkabau", *Rev et. Islam*, 1955
- Isenberg, Nancy, "The Personal is Political: Gender, Feminism, and the Politics of Discourse Theory", *American Quarterly*, Vol. 44, No. 3. 1992.
- Martilova, Novera, "Analisis Kualitas Sumber Daya Perempuan di Indonesia", *Humanisma: Journal of Gender Studies*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Sanbonmatsu, Kira, "Gender-Related Political Knowledge and the Descriptive Representation of Women Political Behavior", *Political Behaviour*, Vol. 25, No. 4, 2003.

Windyastuti, Dwi, “Pengaruh Sosialisasi Gender pada Perempuan Kelas Menengah terhadap Kesadaran Politik,” *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. XIV, No. 2, 2001.

Farrior, Stephanie, “Human Rights Advocacy on Gender Issues: Challenges and Opportunities”, *Journal of Human Rights Practice*, Vol. 1, No. 1, 2009.

Byrnes, A. and E. Bath, “Violence against Women, the Obligation of Due Diligence, and the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – Recent Developments”, *Human Rights Law Review*, Vol. 8, No. 3, 2008.

Tabloid

Asyarie, Musa, “Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa”, *Republika*, Jum’at 03 September 2004.

Cuisinier, Jeanne, “Les Madrasa Feminines de Minangkabau” *Rev et. Islam 1955*.

Rasyad, Aminuddin, “Rahmah el-Yunusiyah: Kartini Perguruan Islam”, *Prisma*, edisi Agustus, 1977.

Suparno, Paul, “Pendidikan Multikultural”, *Harian Kompas*, 7 Januari 2003.

